BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan dinas yang bertugas dalam unsur pembantu Wali Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Sebagai kantor dinas yang mengurus banyak kegiatan tentu saja membutuhkan pegawai yang mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal itu tentu saja membutuhkan kecukupan dan kecakapan pegawai. Beberapa temuan penelitian ini adalah:

1. Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi masih memerlukan penambahan pegawai, sebab pada beberapa bagian masih kekurangan sehingga pegawai yang ada yang harus bekerja lebih ekstra agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Walau demikian hasilnya masih belum maksimal.
2. Terjadi kelebihan beban kerja pada beberapa bagian yang masih membutuhkan pegawai negeri sipil (pegawai tetap) walaupun sudah dibantu oleh pegawai honorer, namun kinerja masih belum maksimal walaupun dalam menyelesaikan pekerjaan harus mengerjakan diluar jam kerja atau lembur.
3. Analisis jabatan pada kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi masih belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat beberapa formasi jabatan atau posisi yang masih kosong yang membutuhkan pegawai tetap yang sesuai dengan kapasitasnya.
4. Analisis beban kerja pada kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi masih belum sesuai yang telah ditetapkan sehingga masih terdapat beberapa pegawai yang memiliki kelebihan beban kerja.

5.3 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, maka terdapat beberapa implikasi manajerial yang disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penambahan pegawai tetap untuk mengisi beberapa posisi yang masih kosong pada Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
2. Perlu penempatan pegawai sesuai dengan keahlian pada bagian Pengadministrasian Umum, Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman, Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pengawas Bangunan dan Gedung, dan Pengelola Sarana dan Prasarana Pemakaman Umum di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
3. Perlu memperhatikan dan menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Instansi Pusat dan Instansi Daerah Wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN.